

ABSTRAK

SEJARAH EKONOMI TERPIMPIN
(1959 - 1966)

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan. Pertama, untuk mengetahui latar belakang lahirnya konsep Ekonomi Terpimpin. Kedua, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Dan ketiga, untuk mengetahui dampak pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan. Dan dari penelitian ini diketahui bahwa secara esensial sistem Ekonomi Terpimpin merupakan bagian yang integral dari sistem Demokrasi Terpimpin - yang diciptakan oleh Presiden Soekarno. Lahirnya sistem Ekonomi Terpimpin - menurut Presiden Soekarno - sebagai alternatif terbaik untuk menggantikan sistem Ekonomi Liberal yang diterapkan pada periode Demokrasi Liberal (Parlemen-ter). Menurut Presiden Soekarno, dengan sistem Ekonomi Liberal yang menganut semboyan "laissez faire" sangat tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 - terutama amanat pasal 33 UUD 1945. Dengan sendirinya tidak akan sanggup memperbaiki standar kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

Dengan sistem Ekonomi Terpimpin - yang disinyalir sebagai yang paling sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 - terutama amanat pasal 33 UUD 1945 - akan sanggup mengantar bangsa Indonesia mencapai suatu tatanan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, bersih dari sisa-sisa feodalisme dan tanpa adanya penghisapan manusia oleh manusia. Itulah masyarakat Sosialisme ala Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, diciptakanlah beberapa kebijaksanaan ekonomi seperti Deklarasi Ekonomi (Dekon) dan Peraturan-peraturan 23 Mei 1963 - dengan menganut pola pembangunan Semesta Berencana.

Kendati secara teoritis, konsep Ekonomi Terpimpin itu begitu "prestisius" - namun dalam pelaksanaannya "jauh" menyimpang dari tujuan semula yang direncanakan. Indikatornya dapat dirunut dari:

1. Lahirnya kecenderungan sifat ekonomi yang serba negara (etatism), dengan menempatkan perusahaan negara sebagai sentral dalam keseluruhan kebijaksanaan ekonomi nasional.
2. Akibatnya sektor swasta (perusahaan swasta) dan sektor koperasi sangat teralienasi dari format esensial ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
3. Akibat lemahnya sistem pengawasan, sangat banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat dan terlibatnya elit militer dan elit politik dalam kehidupan ekonomi secara langsung, berakibat pada terbentuknya pola

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

"patron-klien", yang nantinya ikut menciptakan iklim yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya tindak penyelewengan seperti korupsi, kolusi, monopoli, sistem koneksi, sistem lisensi dan lain sebagainya.

Dengan demikian, secara umum gambaran perekonomian Indonesia pada era Ekonomi Terpimpin (1959-1966) sangat memprihatinkan. Terjadinya inflasi yang sangat tinggi defisit anggaran belanja pemerintah, timpangnya neraca perdagangan dan neraca pembayaran adalah "deretan ciri-ciri" yang memeterai perekonomian Indonesia pada periode itu.



ABSTRACT

THE HISTORY OF THE GUIDED ECONOMY SYSTEM
(1959 - 1966)

This analysis for the purpose of answering three main problems of the Guided Economy system, namely to know the background of the Guided Economy system's concept (1st), to see how its development during the period of 1959 - 1966 (2nd) and to understand the effects of this system (3rd).

Through bibliographical approach system we know this system was the basically integrated part of Guided Democracy system created by the first President of Indonesia - Soekarno. According to him the birth of this system was the best alternative to substitute the Liberal Economy system that was held during the Liberal Democracy. And the "laissez faire" system did not suit with Pancasila and UUD 1945 especially the article 33 of UUD 1945, because this system could not raise the nation living standard.

The Guided Economy system was seen as the very suit system with Pancasila and UUD 1945 especially the article 33 of UUD 1945. This system can support Indonesian people to get their economy system that more nationalistic, democratic, clean from feudalism and contra to human greediness. That is the real social nation of Indonesia.

In its execution there were some economy policies like Economy Declaration (DEKON) and May 23rd rule with whole Development Programme as its main pattern.

Though it was theoretical and pretigious but in fact it was so far away from its main aims. We can see it three the following indications:

1. Etatism Economy merged by making "Governmental Company" as the basic point for the national economy policy;
2. This made the private and cooperative companies become more alienated from the national basic economy pattern - Pancasila, UUD 1945 and article 33 of UUD 1945;
3. The weakness of control system, military superiority and political issues "client-pattern" caused the growing of corruptions, monopoly, collusion, concession, etc.

Finally, we know that Indonesian economy system during the time of Guided Economy system (1959-1966) was very poor. High inflation, deficit in cost budget, lost of sheet balance was the main characteristics of Indonesian Economy during that period.